2023

Drs. IYAN EDIYANA, MM.,M.Si.,CGCAE
Inspektur Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon Keraton

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Cirebon, Februari 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Drs. IYAN EDIYANA M.M., M.Si.
NIP. 196612091993121002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian 3 sasaran strategis Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Laporan Yang Berindikasi Korupsi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah :

   a) Diukur dengan indikator nilai indeks reformasi birokrasi, nilai monitoring center for prevention (MCP) KPK RI dan Indeks kepuasan masyarakat .

   b) Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 Program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintah;

   c) Target capaian indikator sasaran tahun 2023 indeks reformasi birokrasi 70 poin, nilai monitoring center for prevention (MCP) KPK RI 80 prosen dan Indeks kepuasan masyarakat 88 prosen; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi indeks reformasi birokrasi 67,83%, nilai monitoring center for prevention (MCP) KPK RI 89% dan Indeks kepuasan masyarakat 88 prosen. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) indeks reformasi birokrasi 96,90% nilai monitoring center for prevention (MCP) KPK RI 111,25% dan Indeks kepuasan masyarakat 100%.

   d) Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 terjadi peningkatan indeks reformasi birokrasi 11,65 poin, Indeks kepuasan masyarakat naik 0,97% dan nilai monitoring center for prevention (MCP) KPK RI turun 2% tetapi masih di atas target yang ditetapkan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon ke depan, sebagai berikut:

a. Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Cirebon mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
b. Pengawasan oleh Kementerian Teknis pada Pemda Kabupaten Cirebon

belum terkoordinasi secara baik, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kementerian Teknis tidak terpantau oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon;

c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD.

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Ikhtisar Eksekutif 3
Daftar Tabel 6
Daftar Gambar 7
BAB I Pendahuluan 8
1.1 **Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah** 8
1.2 **Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi** 9
1.3 **Tugas Fungsi dan Peta Jabatan** 11
1.4 **Isu-Isu Strategis** 12
1.5 **Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran** . 14
1.6 **Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022** 18
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 19
2.1 **Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD** 19
2.2 **Strategi dan Arah Kebijakan** 20
2.3 **Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023** 20
2.4 **Perjanjian Kinerja Tahun 2023** 23
2.5 **Instrumen Pendukung Capaian Kinerja** 25
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja 28
3.1 **Capaian Kinerja Tahun 2023** 28
3.1.1 **Pemeriksaan BPK RI** 29
3.1.2 **Pemeriksaan Itjen Kemendagri RI** 31
3.1.3 **Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon** ... 32
3.2 **Capaian Kinerja Lainnya** 35
3.3 **Efisiensi Anggaran** 38
3.4 **Inovasi** 39
3.5 **Lintas Sektor** 40
BAB 4 Penutup 45
L A M P I R A N 47

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Cirebon 14
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... 16
Tabel I. 3 Kondisi Jabatan Pelaksana Inspektorat Kabupaten Cirebon..... 17
Tabel I. 4 Sarana-Prasarana 20
Tabel I. 5 Anggaran Tahun 2023..... 26
Tabel I. 6 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022..... 26

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon, 2019-2024 29
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 30
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 30
Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 31
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Cirebon Tahun 2023..... 33
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Reviu Inspektur Tahun 2023 33
Tabel II. 7 Dukungan Anggaran untuk Mencapai Sasaran Strategis 34

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 37
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023 37
Tabel III. 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Pada Pemda Kabupaten Cirebon..... 38
Tabel III. 4 Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon 39
Tabel III. 5 Pengukuran Capaian Sasaran..... 40
Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 40
Tabel III. 7 Area Intervensi, Indikator, Dan Sub Indikator Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2023..... 43
Tabel III. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021..... 46
Tabel III. 9 Inventarisasi Lintas Sektor Inspektorat Kabupaten Cirebon..... 47

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Inspektorat 9
Gambar I. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Inspektorat Kabupaten Cirebon.....9

Gambar II. 1 Sistem Informasi Pengawasan Daerah.....35
Gambar II. 2 Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut 35
Gambar II. 3 Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.....36

Gambar III. 1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Cirebon.....45

Gambat III.2 Capaian MCP KPK Pemda Kabupaten Cirebon

Gambar III.3 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB I
Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.12).

Adapun tujuan penyusunan LKIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024. Inspektorat Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Inspektorat

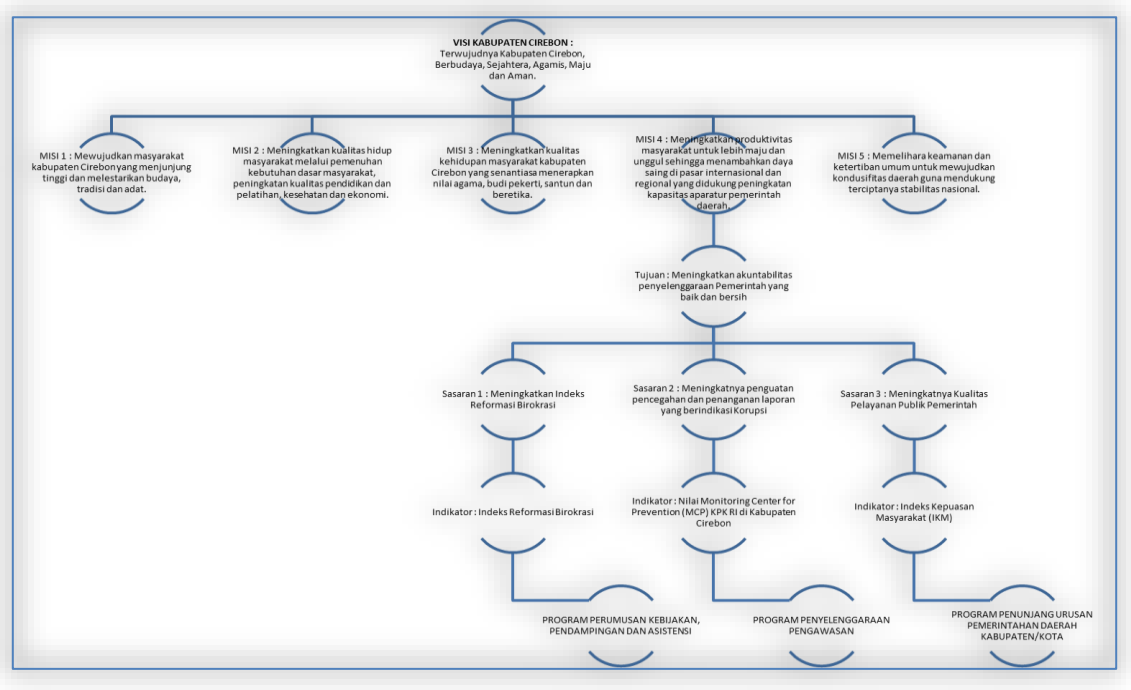

Sumber: Renstra Inspektorat 2019-2024

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Inspektorat Kabupaten Cirebon

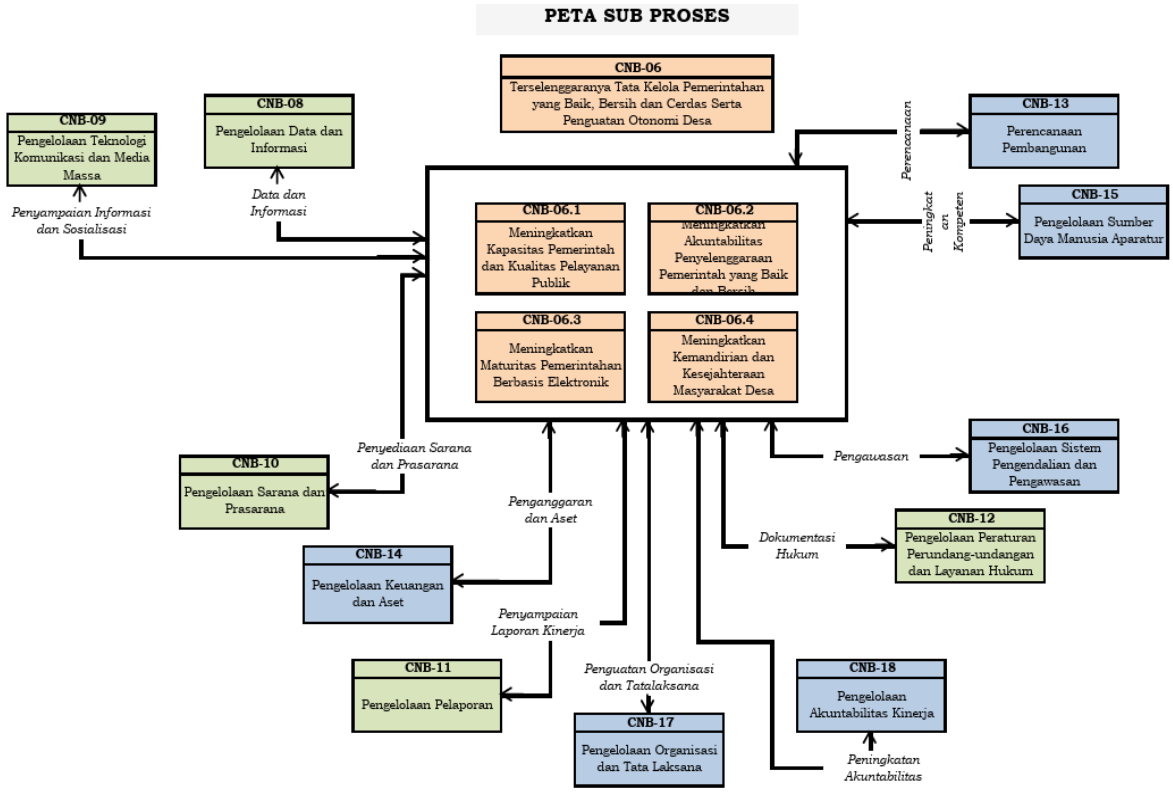

PETA RELASI

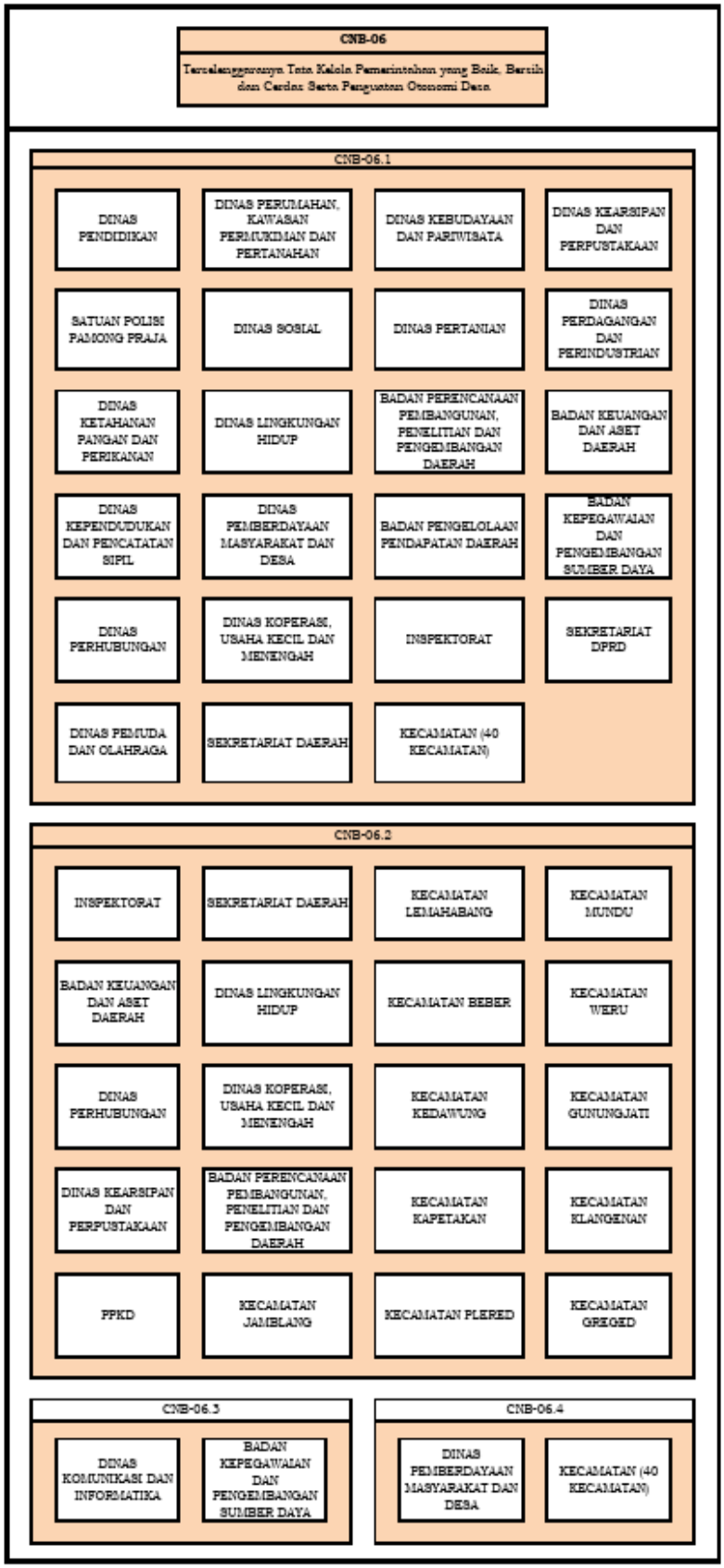

Sumber: RaPerbup Kabupaten Cirebon No. Th. 2023

Peta Lintas Fungsi

a. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik

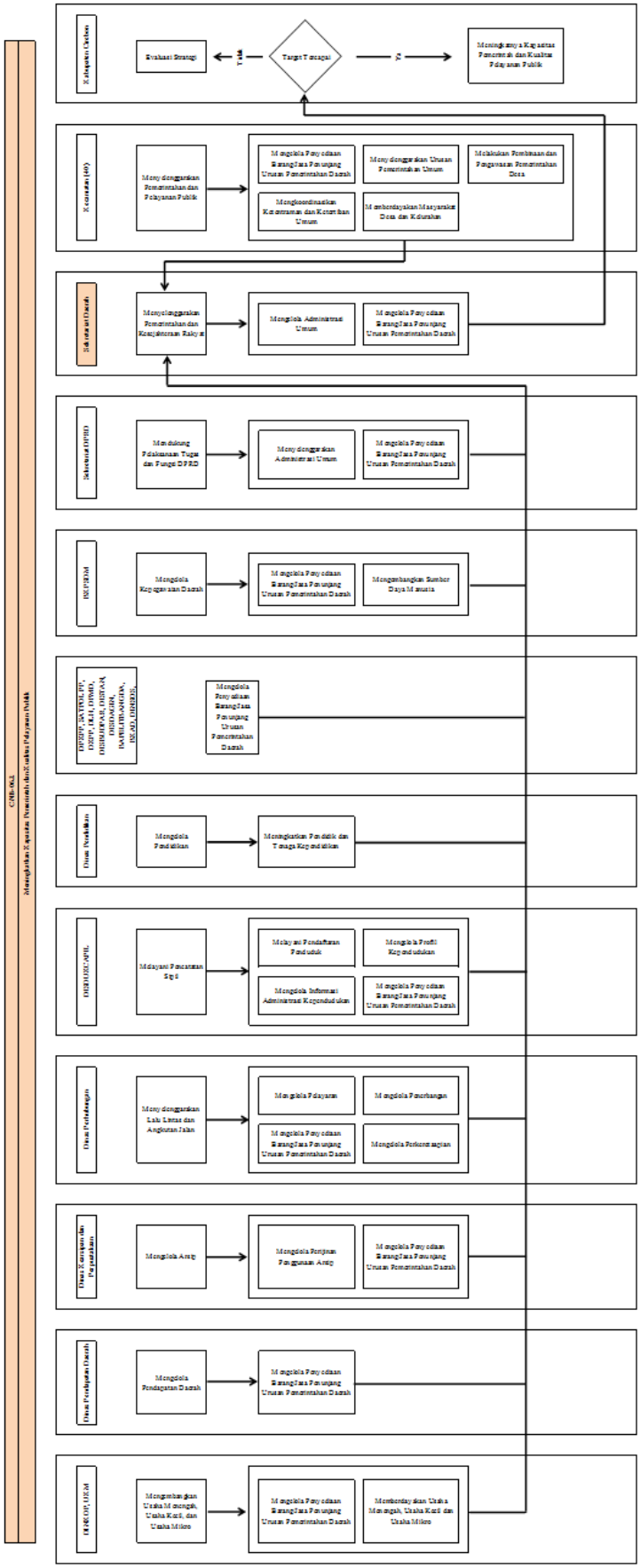

b. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih

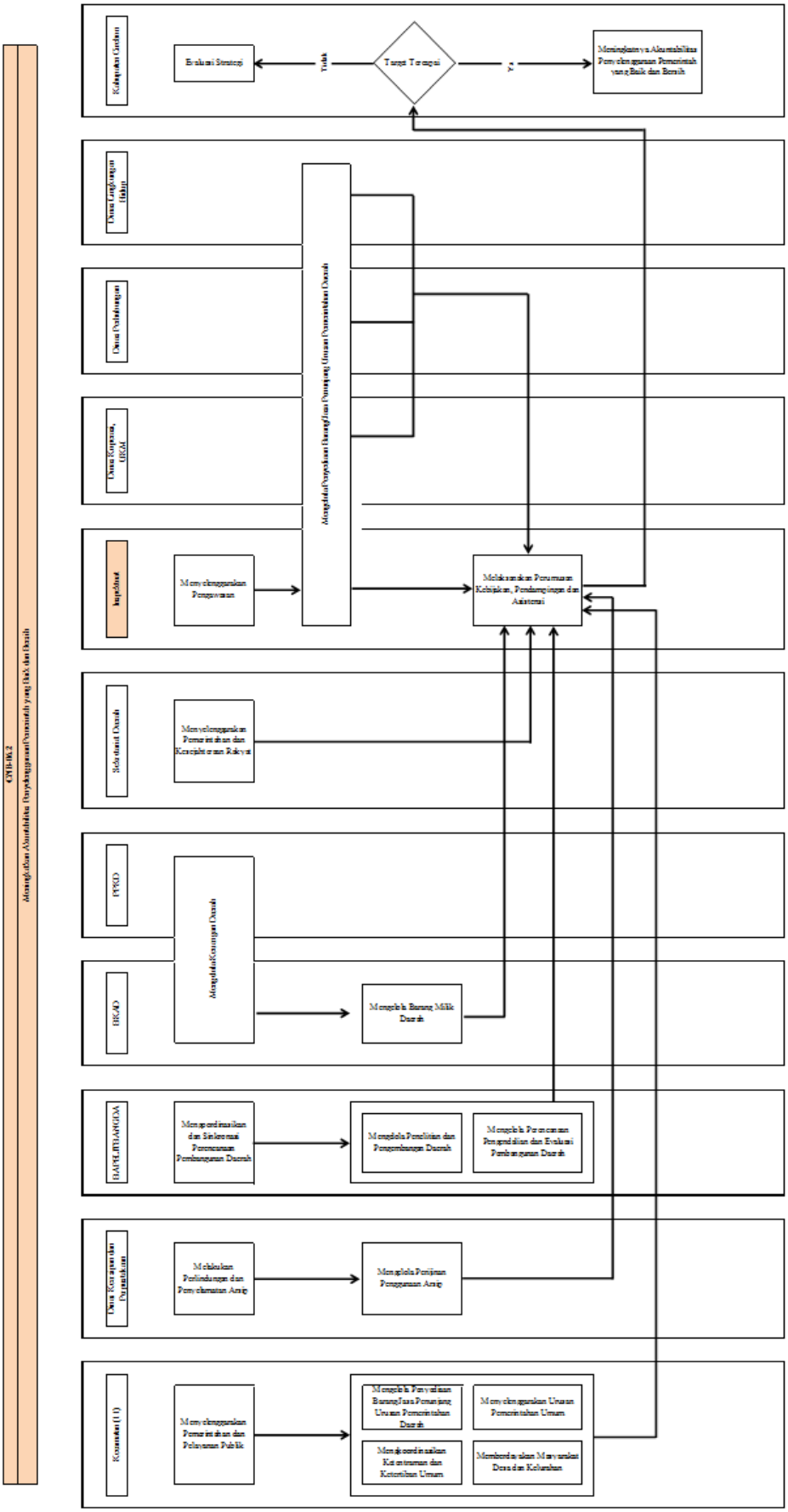

c. Meningkatkan Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik

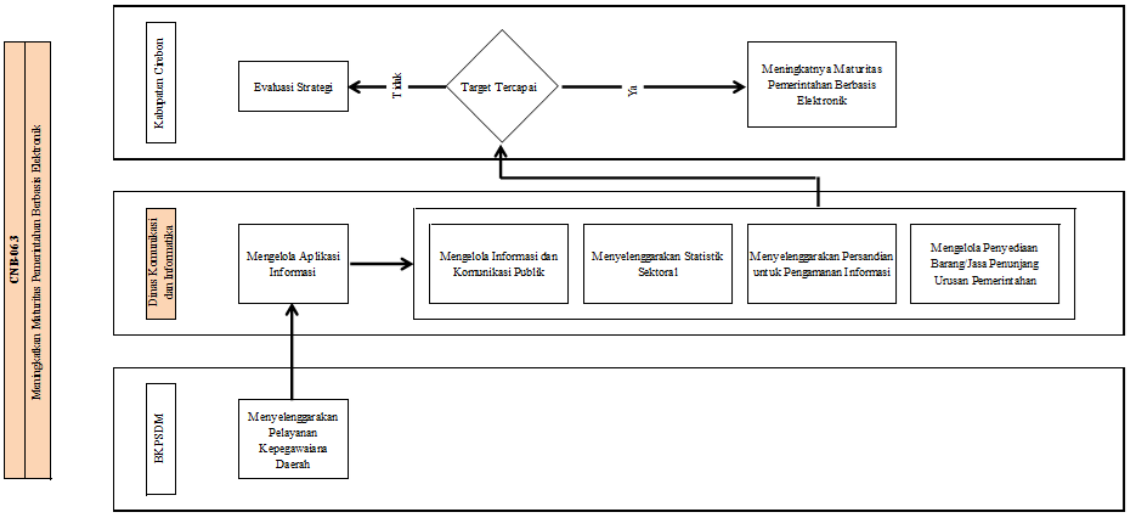

d. Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

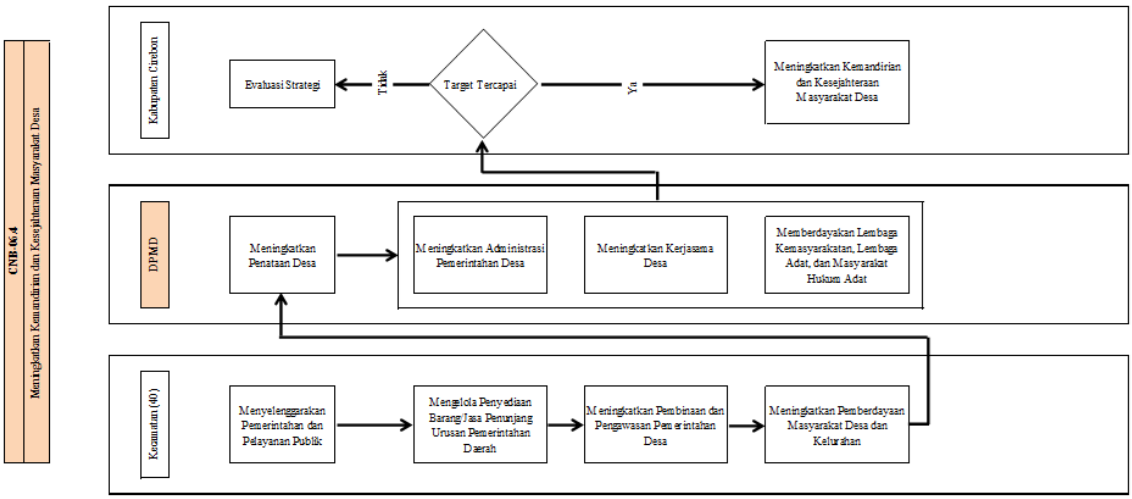

1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:

a. Perumusan bahan perencanaan pada Inspektorat;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tabel I. 1 Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Cirebon

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Inspektorat Kabupaten Cirebon 2. Sekretaris: 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Inspektur Pembantu I 4. Inspektur Pembantu II 5. Inspektur Pembantu III 6. Inspektur Pembantu IV 7. Inspektur Pembantu Khusus	1. Dibawah urusan Program dan Monitoring Evaluasi: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 2) Pengelola Sistem dan Jaringan; 3) Pengelola Pengawasan 2. Dibawah urusan Keuangan: 1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akutansi; 5) Verifikator Data laporan Keuangan. 3. Dibawah Kasubbag Umum: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Pengadministrasi Kepegawaian; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Pengelola Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 4. Dibawah Inspektur Pembantu	1. Auditor 2. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 3. Perencana Ahli Muda 4. Analis Kebijakan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan yang mendasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip- prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta pemenuhan sarana dan prasaran pendukung pengawasan.

Isu strategis lain yang perlu untuk dilaksanakan adalah:

1. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
3. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah, jam diklat per orang;
4. mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Control for Prevention (MCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi

Pencegahan Korupsi tingkat nasional

5. Pengawasan terkait masa akhir jabatan Bupati periode 2019-2024;
6. Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dimana pada pelaksanaan sebelumnya penilaian maturitas SPIP hanya dilakukan pada Inspktorat akan tetapi pada tahun 2023 telah dimulai penilaian mandiripada seluruh OPD dan Pemda.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Perem p
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-		1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	6	6	-	-	-	6	4	2	-	-	-	4	2
	2. Pengawas	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	3.Pelaksana	24	-	9	10	4	7	-	2	2	2	1	7	1
C.	Jabatan Fungsional	129	6	113	10	-	75	16	59	-	-	-	41	33
	Jumlah	161	13	122	20	4	90	34	37	3	7	-	53	37

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Cirebon per Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat tersebar pada jenjang SMA sampai dengan S2. Di jabatan administrator masih ada pegawai berlatar belakang pendidikan yang masih kurang dari kualifikasi jabatan yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 53 orang lebih besar dibandingkan pegawai perempuan sebanyak 37 orang.

Kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten Cirebon baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 94 tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon apabila disandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel I. 3 Kondisi Jabatan Pelaksana Inspektorat Kabupaten Cirebon

INSPEKTORAT	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN ASN
Inspektur	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Kebijakan Publik	1
Sekretaris Inspektorat	S1/ DIV di bidang Administrasi Negara/Administrasi Publik/ Administrasi Perkantoran/ Pemerintahan/ Hukum/ Sosial/ Psikologi/ Akuntansi/ Manajemen	1
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	S1/ DIV/ S2 di bidang Sosial dan Politik/Kebijakan Publik/ Administrasi/ Pemerintahan/ Hukum atau bidang yang sesuai dengan tugas jabatan	1
JF Perencana Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Pemerintahan/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial/ Hukum	1
Analis Pengawasan	S1/ DIV di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Hukum/ Pemerintahan/ Sosial dan Politik/ Kebijakan Publik	1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S1/ DIV di bidang Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Pemerintahan/ Ekonomi/ Sosial	1
Bendahara	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen	1
Verifikator Keuangan	DIII di bidang Akuntansi/Manajemen/ Administrasi Perkantoran	1
Pengelola Akuntansi	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	1
Pengelola Keuangan	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	1
Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ administrasi Perkantoran	1
Pengelola Pengawasan	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	1
Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	4
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika	4
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran	1
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	S1/ DIV di bidang Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Administrasi Perkantoran/ Pemerintahan/ Hukum/ Sosial/ Psikologi	1
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1/ DIV di bidang Manajemen/ Administrasi Negara/ Publik	1
Pengelola Kepegawaian	DIII di bidang Administrasi Negara/ Administrasi Perkantoran	1
Sekretaris	DIII di bidang Sekretaris/ Administrasi Perkantoran	1
Pengadministrasi Umum	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran	2
Pengemudi	SLTA/ Sederajat	1
Pramu Bakti	SLTA/ Sederajat	1
Inspektur Pembantu I	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika/ Kebijakan Publik	1
JF Auditor Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/Pemerintahan/Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4

JF Auditor Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Auditor Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	6
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
Inspektur Pembantu II	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika/ Kebijakan Publik	1
JF Auditor Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan /Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4
JF Auditor Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen /Administrasi/Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Auditor Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	6
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
Inspektur Pembantu III	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika/ Kebijakan Publik	1
JF Auditor Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4
JF Auditor Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Auditor Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	6

JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
Inspektur Pembantu IV	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika/ Kebijakan Publik	1
JF Auditor Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4
JF Auditor Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Auditor Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	6
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika	3
Inspektur Pembantu Khusus	S1/ DIV di bidang Pemerintahan/ Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Sosial dan Politik/ Administrasi/ Teknik/ Informatika/ Kebijakan Publik	1
JF Auditor Ahli Madya	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4
JF Auditor Ahli Muda	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6
JF Auditor Ahli Pertama	S1/ DIV di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen /Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5
JF Auditor Penyelia	DIII di bidang di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
JF Auditor Pelaksana Lanjutan	DIII di bidang di bidang Hukum/ Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Hukum/ Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		1
JUMLAH JABATAN ADMINISTRATOR		6
JUMLAH JABATAN PENGAWAS		1
JUMLAH JABATAN PELAKSANA		24
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL		129

Tahun 2023 belum ada penataan kepegawaian di Inspektorat Kabupaten Cirebon sehingga Jabatan analis sumber daya manusia dan kustodian barang milik negara menggunakan nomenklatur pengelola kepegawaian dan pengelola barang milik negara sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 94 tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dari tabel 1.2 diketahui bahwa masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang yaitu 12 jabatan fungsional dan 16 jabatan administrasi. Untuk mengisi kekurangan pegawai pada jabatan administrasi telah diisi dengan 10 orang tenaga bantu.

Tabel I. 4 Sarana-Prasarana

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
1	**ASET**	**885**	**7.292.434.758,00**
1.3.	**ASET TETAP**	**775**	**7.107.264.239,00**
1.3.1.	**TANAH.**	**1**	**1.054.000.000,00**
1.3.1.01.	**TANAH.**	**1**	**1.054.000.000,00**
1.3.1.01.01.	**TANAH PERSIL.**	**1**	**1.054.000.000,00**
1.3.1.01.01.04.	**TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA.**	**1**	**1.054.000.000,00**
1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.	1	1.054.000.000,00
1.3.2.	**PERALATAN DAN MESIN.**	**719**	**6.210.232.465,04**
1.3.2.01.	**ALAT BESAR.**	**1**	**2.600.000,00**
1.3.2.01.03.	**ALAT BANTU.**	**1**	**2.600.000,00**
1.3.2.01.03.05.	**POMPA.**	**1**	**2.600.000,00**
1.3.2.01.03.05.002	Portable Water Pump.	1	2.600.000,00
1.3.2.02.	**ALAT ANGKUTAN.**	**60**	**3.084.334.615,50**
1.3.2.02.01.	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR.**	**60**	**3.084.334.615,50**
1.3.2.02.01.02.	**KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG.**	**18**	**2.535.338.816,00**
1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).	18	2.535.338.816,00
1.3.2.02.01.04.	**KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA.**	**42**	**548.995.799,50**
1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor.	42	548.995.799,50
1.3.2.03.	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.**	**31**	**46.622.000,00**
1.3.2.03.02.	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN.**	**31**	**46.622.000,00**
1.3.2.03.02.07.	**PERKAKAS BENGKEL KERJA.**	**3**	**9.450.000,00**
1.3.2.03.02.07.003	Bor.	3	9.450.000,00
1.3.2.03.02.11.	**PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING.**	**28**	**37.172.000,00**
1.3.2.03.02.11.003	Rol Meter.	28	37.172.000,00
1.3.2.05.	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.**	**462**	**1.638.381.343,04**
1.3.2.05.01.	**ALAT KANTOR.**	**87**	**608.877.004,26**
1.3.2.05.01.01.	**MESIN KETIK.**	**2**	**5.964.193,00**
1.3.2.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik.	2	5.964.193,00
1.3.2.05.01.02.	**MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH.**	**1**	**2.960.000,00**
1.3.2.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang.	1	2.960.000,00
1.3.2.05.01.03.	**ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN).**	**2**	**23.772.000,00**
1.3.2.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio.	2	23.772.000,00
1.3.2.05.01.04.	**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.**	**59**	**240.823.623,26**
1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal.	25	110.497.869,00

1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu.	1	5.000.000,00
1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi.	1	638.000,00
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi.	29	53.413.136,26
1.3.2.05.01.04.007	Brandkas.	2	16.124.618,00
1.3.2.05.01.04.016	Roll Opek.	1	55.150.000,00
1.3.2.05.01.05.	**ALAT KANTOR LAINNYA.**	**23**	**335.357.188,00**
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System.	5	256.489.000,00
1.3.2.05.01.05.005	White Board.	1	862.144,00
1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas.	10	27.747.441,00
1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus.	5	42.120.000,00
1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi.	2	8.138.603,00
1.3.2.05.02.	**ALAT RUMAH TANGGA.**	**290**	**663.521.341,28**
1.3.2.05.02.01.	**MEUBELAIR.**	**226**	**364.033.225,28**
1.3.2.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal.	6	24.600.000,00
1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat.	3	40.770.000,00
1.3.2.05.02.01.014	Meja Resepsionis.	2	19.195.000,00
1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro.	55	114.999.216,93
1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat.	23	14.375.000,00
1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar.	22	22.495.936,00
1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa.	106	66.020.945,36
1.3.2.05.02.01.048	Sofa.	9	61.577.126,99
1.3.2.05.02.03.	**ALAT PEMBERSIH.**	**1**	**4.730.000,00**
1.3.2.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.	1	4.730.000,00
1.3.2.05.02.04.	**ALAT PENDINGIN.**	**24**	**145.412.301,00**
1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es.	6	26.264.801,00
1.3.2.05.02.04.004	AC Split.	18	119.147.500,00
1.3.2.05.02.05.	**ALAT DAPUR.**	**1**	**734.800,00**
1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur).	1	734.800,00
1.3.2.05.02.06.	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).**	**20**	**87.527.888,00**
1.3.2.05.02.06.002	Televisi.	2	21.435.000,00
1.3.2.05.02.06.012	Wireless.	1	2.730.784,00
1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply.	5	5.298.185,00
1.3.2.05.02.06.022	Camera film.	6	29.793.919,00
1.3.2.05.02.06.038	Dispenser.	4	9.010.000,00
1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam.	2	19.260.000,00
1.3.2.05.02.07.	**ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**	**18**	**61.083.127,00**
1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable.	18	61.083.127,00
1.3.2.05.03.	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT.**	**85**	**365.982.997,50**
1.3.2.05.03.01.	**MEJA KERJA PEJABAT.**	**39**	**294.293.543,00**
1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II.	1	2.271.101,00
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	5	7.822.442,00
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	5	15.750.000,00
1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural.	28	268.450.000,00
1.3.2.05.03.02.	**MEJA RAPAT PEJABAT.**	**1**	**885.000,00**
1.3.2.05.03.02.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II.	1	885.000,00
1.3.2.05.03.03.	**KURSI KERJA PEJABAT.**	**41**	**66.055.684,50**
1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II.	1	1.580.000,00
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	12	23.367.418,50
1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	5	12.500.000,00

1.3.2.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural.	23	28.608.266,00
1.3.2.05.03.04.	**KURSI RAPAT PEJABAT.**	**3**	**3.030.000,00**
1.3.2.05.03.04.003	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD.	3	3.030.000,00
1.3.2.05.03.07.	**LEMARI DAN ARSIP PEJABAT.**	**1**	**1.718.770,00**
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II.	1	1.718.770,00
1.3.2.06.	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.**	**7**	**106.890.705,00**
1.3.2.06.01.	**ALAT STUDIO.**	**5**	**96.095.482,00**
1.3.2.06.01.01.	**PERALATAN STUDIO AUDIO.**	**4**	**90.570.000,00**
1.3.2.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC.	1	11.000.000,00
1.3.2.06.01.01.041	Professional Sound System.	1	16.170.000,00
1.3.2.06.01.01.060	Paging Mic.	1	9.900.000,00
1.3.2.06.01.01.090	Digital LED Running Text.	1	53.500.000,00
1.3.2.06.01.04.	**PERALATAN CETAK.**	**1**	**5.525.482,00**
1.3.2.06.01.04.014	Mesin Jilid.	1	5.525.482,00
1.3.2.06.02.	**ALAT KOMUNIKASI.**	**2**	**10.795.223,00**
1.3.2.06.02.01.	**ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.**	**1**	**2.707.486,00**
1.3.2.06.02.01.010	Facsimile.	1	2.707.486,00
1.3.2.06.02.06.	**ALAT KOMUNIKASI SOSIAL.**	**1**	**8.087.737,00**
1.3.2.06.02.06.002	Wireless Amplifier.	1	8.087.737,00
1.3.2.08.	**ALAT LABORATORIUM.**	**3**	**59.035.700,00**
1.3.2.08.01.	**UNIT ALAT LABORATORIUM.**	**3**	**59.035.700,00**
1.3.2.08.01.06.	**ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI.**	**2**	**49.334.800,00**
1.3.2.08.01.06.062	Concrette Hammer Set.	1	24.667.300,00
1.3.2.08.01.06.085	Mesin Uji Mekanik(Manual).	1	24.667.500,00
1.3.2.08.01.07.	**ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA.**	**1**	**9.700.900,00**
1.3.2.08.01.07.007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia).	1	9.700.900,00
1.3.2.10.	**KOMPUTER.**	**155**	**1.272.368.101,50**
1.3.2.10.01.	**KOMPUTER UNIT.**	**87**	**836.889.761,50**
1.3.2.10.01.02.	**PERSONAL KOMPUTER.**	**87**	**836.889.761,50**
1.3.2.10.01.02.001	PC Unit.	26	263.205.761,50
1.3.2.10.01.02.002	Lap Top.	61	573.684.000,00
1.3.2.10.02.	**PERALATAN KOMPUTER.**	**68**	**435.478.340,00**
1.3.2.10.02.03.	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.**	**66**	**320.902.675,00**
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer).	41	130.604.071,00
1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	20	183.137.604,00
1.3.2.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk.	5	7.161.000,00
1.3.2.10.02.04.	**PERALATAN JARINGAN.**	**2**	**114.575.665,00**
1.3.2.10.02.04.001	Server.	1	113.975.000,00
1.3.2.10.02.04.004	Modem.	1	600.665,00
1.3.3.	**GEDUNG DAN BANGUNAN.**	**6**	**5.543.346.300,00**
1.3.3.01.	**BANGUNAN GEDUNG.**	**6**	**5.543.346.300,00**
1.3.3.01.01.	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA.**	**6**	**5.543.346.300,00**
1.3.3.01.01.01.	**BANGUNAN GEDUNG KANTOR.**	**1**	**5.227.682.300,00**
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen.	1	5.227.682.300,00
1.3.3.01.01.33.	**BANGUNAN PARKIR.**	**4**	**285.464.000,00**
1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen.	3	187.850.000,00
1.3.3.01.01.33.002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen.	1	97.614.000,00
1.3.3.01.01.36.	**TAMAN.**	**1**	**30.200.000,00**

1.3.3.01.01.36.002	Taman Semi Permanen.	1	30.200.000,00
1.3.4.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI.**	**2**	**91.490.125,00**
1.3.4.03.	**INSTALASI.**	**1**	**71.245.350,00**
1.3.4.03.01.	**INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU.**	**1**	**71.245.350,00**
1.3.4.03.01.03.	**INSTALASI AIR TANAH DALAM.**	**1**	**71.245.350,00**
1.3.4.03.01.03.003	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Besar.	1	71.245.350,00
1.3.4.04.	**JARINGAN.**	**1**	**20.244.775,00**
1.3.4.04.03.	**JARINGAN TELEPON.**	**1**	**20.244.775,00**
1.3.4.04.03.01.	**JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH.**	**1**	**20.244.775,00**
1.3.4.04.03.01.001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil.	1	20.244.775,00
1.3.5.	**ASET TETAP LAINNYA.**	**46**	**28.496.000,00**
1.3.5.01.	**BAHAN PERPUSTAKAAN.**	**46**	**28.496.000,00**
1.3.5.01.01.	**BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK.**	**45**	**28.481.000,00**
1.3.5.01.01.04.	**BUKU ILMU SOSIAL.**	**45**	**28.481.000,00**
1.3.5.01.01.04.005	Hukum.	45	28.481.000,00
1.3.5.01.03.	**KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN.**	**1**	**15.000,00**
1.3.5.01.03.01.	**BAHAN KARTOGRAFI.**	**1**	**15.000,00**
1.3.5.01.03.01.001	Peta (Map).	1	15.000,00
1.3.6.	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.**	**1**	**20.312.000,00**
1.3.6.01.	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.**	**1**	**20.312.000,00**
1.3.6.01.01.	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.**	**1**	**20.312.000,00**
1.3.6.01.01.01.	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.**	**1**	**20.312.000,00**
1.3.6.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan.	1	20.312.000,00
1.3.7.	**AKUMULASI PENYUSUTAN.**		**-5.840.612.651,04**
1.3.7.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN.**		**-4.962.682.654,04**
1.3.7.01.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR.**		**-2.600.000,00**
1.3.7.01.01.03.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU.**		**-2.600.000,00**
1.3.7.01.01.03.005	Akumulasi Penyusutan Pompa.		-2.600.000,00
1.3.7.01.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN.**		**-2.825.263.162,50**
1.3.7.01.02.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR.**		**-2.825.263.162,50**
1.3.7.01.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang.		-2.330.695.955,00
1.3.7.01.02.01.004	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua.		-494.567.207,50
1.3.7.01.03.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.**		**-34.399.800,00**
1.3.7.01.03.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN.**		**-34.399.800,00**
1.3.7.01.03.02.007	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja.		-945.000,00
1.3.7.01.03.02.011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Ukur, Gip dan Feting.		-33.454.800,00
1.3.7.01.05.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA.**		**-1.119.155.843,04**
1.3.7.01.05.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR.**		**-494.631.604,26**
1.3.7.01.05.01.001	Akumulasi Penyusutan Mesin Ketik.		-3.711.793,00
1.3.7.01.05.01.002	Akumulasi Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah.		-2.960.000,00
1.3.7.01.05.01.003	Akumulasi Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan).		-7.131.600,00
1.3.7.01.05.01.004	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.		-169.289.123,26
1.3.7.01.05.01.005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya.		-311.539.088,00
1.3.7.01.05.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT RUMAH**		**-521.071.241,28**

	TANGGA.		
1.3.7.01.05.02.001	Akumulasi Penyusutan Meubelair.		-289.126.525,28
1.3.7.01.05.02.003	Akumulasi Penyusutan Alat Pembersih.		-4.730.000,00
1.3.7.01.05.02.004	Akumulasi Penyusutan Alat Pendingin.		-95.079.401,00
1.3.7.01.05.02.005	Akumulasi Penyusutan Alat Dapur.		-734.800,00
1.3.7.01.05.02.006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).		-70.317.388,00
1.3.7.01.05.02.007	Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran.		-61.083.127,00
1.3.7.01.05.03.	**AKUMULASI PENYUSUTAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT.**		**-103.452.997,50**
1.3.7.01.05.03.001	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat.		-42.813.543,00
1.3.7.01.05.03.002	Akumulasi Penyusutan Meja Rapat Pejabat.		-885.000,00
1.3.7.01.05.03.003	Akumulasi Kursi Kerja Pejabat.		-55.005.684,50
1.3.7.01.05.03.004	Akumulasi Kursi Rapat Pejabat.		-3.030.000,00
1.3.7.01.05.03.007	Akumulasi Lemari dan Arsip Pejabat.		-1.718.770,00
1.3.7.01.06.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.**		**-91.838.705,00**
1.3.7.01.06.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO.**		**-81.043.482,00**
1.3.7.01.06.01.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Audio.		-75.518.000,00
1.3.7.01.06.01.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Cetak.		-5.525.482,00
1.3.7.01.06.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KOMUNIKASI.**		**-10.795.223,00**
1.3.7.01.06.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Telephone.		-2.707.486,00
1.3.7.01.06.02.006	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Sosial.		-8.087.737,00
1.3.7.01.08.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM.**		**-37.451.725,00**
1.3.7.01.08.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM.**		**-37.451.725,00**
1.3.7.01.08.01.006	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi.		-27.750.825,00
1.3.7.01.08.01.007	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia.		-9.700.900,00
1.3.7.01.10.	**AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER.**		**-851.973.418,50**
1.3.7.01.10.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER UNIT.**		**-599.227.703,50**
1.3.7.01.10.01.002	Akumulasi Penyusutan Personal Komputer.		-599.227.703,50
1.3.7.01.10.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KOMPUTER.**		**-252.745.715,00**
1.3.7.01.10.02.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer.		-180.910.675,00
1.3.7.01.10.02.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan.		-71.835.040,00
1.3.7.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN.**		**-859.184.158,00**
1.3.7.02.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG.**		**-859.184.158,00**
1.3.7.02.01.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA.**		**-859.184.158,00**
1.3.7.02.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor.		-790.873.398,00
1.3.7.02.01.01.033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Parkir.		-62.270.760,00
1.3.7.02.01.01.036	Akumulasi Penyusutan Taman.		-6.040.000,00
1.3.7.03.	**AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI.**		**-18.745.839,00**
1.3.7.03.03.	**AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI.**		**-3.562.269,00**
1.3.7.03.03.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU.**		**-3.562.269,00**
1.3.7.03.03.01.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam.		-3.562.269,00
1.3.7.03.04.	**AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN.**		**-15.183.570,00**

1.3.7.03.04.03.	**AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN TELEPON.**		**-15.183.570,00**
1.3.7.03.04.03.001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Diatas Tanah.		-15.183.570,00
1.5.	**ASET LAINNYA**	**110**	**185.170.519,00**
1.5.3.	**ASET TIDAK BERWUJUD.**	**5**	**282.255.757,00**
1.5.3.01.	**ASET TIDAK BERWUJUD.**	**5**	**282.255.757,00**
1.5.3.01.01.	**ASET TIDAK BERWUJUD.**	**5**	**282.255.757,00**
1.5.3.01.01.05.	**SOFTWARE.**	**5**	**282.255.757,00**
1.5.3.01.01.05.001	Software.	5	282.255.757,00
1.5.4.	**ASET LAIN-LAIN.**	**105**	**434.302.786,29**
1.5.4.01.	**ASET LAIN-LAIN.**	**105**	**434.302.786,29**
1.5.4.01.01.	**ASET LAIN-LAIN.**	**105**	**434.302.786,29**
1.5.4.01.01.01.	**ASET RUSAK BERAT/USANG.**	**105**	**434.302.786,29**
1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	105	434.302.786,29
1.5.5.	**AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.**		**-118.874.382,00**
1.5.5.01.	**AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.**		**-118.874.382,00**
1.5.5.01.01.	**AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.**		**-118.874.382,00**
1.5.5.01.01.01.	**AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD.**		**-118.874.382,00**
1.5.5.01.01.01.005	Akumulasi Amortisasi Software.		-118.874.382,00
1.5.6.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA.**		**-412.513.642,29**
1.5.6.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA.**		**-412.513.642,29**
1.5.6.01.01.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA.**		**-412.513.642,29**
1.5.6.01.01.02.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN.**		**-412.513.642,29**
1.5.6.01.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang.		-412.513.642,29
JUMLAH TOTAL			**7.292.434.758,00**

Sumber: Data Rekonsiliasi Aset Inspektorat KABUPATEN CIREBON tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari 8 (delapan) unit kendaraan dinas jabatan, 10 (sepuluh) unit kendaraan operasional roda 4, 3 (tiga) unit kendaraan jabatan roda dua dan 39 (tiga puluh sembilan) unit kendaraan operasional roda dua. Kebutuhan ruangan kantor belum memadai, baik ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan ruang laktasi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, namun sebagian besar memerlukan peremajaan karena secara fungsi sudah tidak layak digunakan untuk melaksanakan ketugasan.

Tabel I. 5 Anggaran Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
BELANJA DAERAH	**26.494.626.650,00**	**28.082.067.850,00**	**1.587.441.200,00**	**5,99**
BELANJA OPERASI	**23.488.042.100,00**	**25.024.036.800,00**	**1.535.994.700,00**	**6,54**
Belanja Pegawai	15.970.756.800,00	16.968.731.800,00	997.975.000,00	6,25
Belanja Barang dan Jasa	7.517.285.300,00	8.055.305.000,00	538.019.700,00	7,16
BELANJA MODAL	**3.006.584.550,00**	**3.058.031.050,00**	**51.446.500,00**	**1,71**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.584.550,00	658.031.050,00	51.446.500,00	8,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	**26.494.626.650,00**	**28.082.067.850,00**	**1.587.441.200,00**	**5,99**
SURPLUS(DEFISIT)	**(26.494.626.650,00)**	**(28.082.067.850,00)**	**(1.587.441.200,00)**	**5,99**
PEMBIAYAAN NETO	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**

Sumber data DPA Inspektorat KABUPATEN CIREBON Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Terlihat pada tabel I.5, untuk tahun 2023 Anggaran Inspektorat Kabupaten Cirebon semula Rp. 26.494.626.650,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 28.082.067.850,00 atau bertambah Rp 1.587.441.200,00.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Nomor 790/LHR.605/Sekret tanggal 13 Maret 2022 menunjukkan Inspektorat Kabupaten Cirebon mendapatkan nilai 74,45 dengan kategori BB dengan interpretasi sangat baik. Dari laporan hasil evaluasi tersebut didapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai berikut.

Tabel I. 6 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	1. Membuat SOP pengumpulan data kinerja untuk mekanisme pengumpulan data kinerja 2. Membuat kertas kerja mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai 3. Melakukan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala per triwulan oleh Parangkat Daerah 4. Merevisi SAKIP pada BAB 3 Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja 5. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dengan mempergunakan teknologi informasi (Aplikasi) 6. Melakukan evaluasi secara berjenjang dalam pengukuran kinerja 7. Dilakukan evaluasi SKP pegawai pada perangkat daerah secara rutin per triwulan	a) Membuat SOP pengumpulan data kinerja; b) Membuat kertas kerja pengumpulan data; c) melakukan pengukuran kinerja secara berkala; d) menyajikan informasi efisiensi penggunaan anggaran e) mengukur capaian kinerja menggunakan aplikasi; f) melakukan evaluasi berjenjang; g) melakukan evaluasi SKP secara rutin; h) mengumpulkan capaian kinerja i) membuat surat pernyataan sudah direviu j) Mengupload laporan kinerja; k) Menampilkan perbandingan realisasi kinerja tahunan l) Menampilkan perbandingan realisasi

	8. Melakukan pengumpulan dokumentasi/capaian kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah 9. Membuat lembar surat pernyataan sudah direview dan ditandatangani oleh ketua tim review internal unit kerja 10. Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja pada website unit kerja secara berkala oleh Pimpinan Perangkat Daerah 11. Merevisi Dokumen Laporan Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah agar menginformasikan perbandingan relisasi kinerja dengan target tahunan terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka tahunan pada Bab 3. 12. Merevisi Dokumen Laporan Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah agar menginformasikan perbandingan relisasi kinerja dengan target jangka menengah terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Bab 3 13. Merevisi Dokumen Laporan Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah agar menginformasikan perbandingan relisasi kinerja dengan target tahun-tahun sebelumnya terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun-tahun sebelumnya pada Bab 3 14. Merevisi Dokumen Laporan Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada Bab 4 15. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan oleh SDM yang memadai dan mengikutsertakan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah dengan pelatihan yang memadai. 16. Melengkapi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan dengan kertas kerja yang memadai. 17. Segera melakukan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya.	kinerja m) Menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya n) Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja o) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui Tim p) Melengkapi kertas kerja yang diperlukan q) Menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas sebelumnya.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada diperlukannya penyesuaian terhadap perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Renstra Inspektorat Kabupaten Cirebon yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2019-2024 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2019-2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019– 2024.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Inspektorat Kabupaten Cirebon mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa yang didukung oleh program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Cirebon selama lima tahun yaitu **"Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih".**

Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam waktu lima tahun sebagai berikut :

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon, 2019-2024

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
	VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN									
1	**MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH**									
1.1		**Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih**	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2,80 Poin	2,75	3,00	3,10	0,00	0,00	3,10
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	0,00 Persen	0,00	0,00	0,00	79,33	83,00	83,00
1.1.1		Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	50,58 Poin	55,00	60,00	65,00	0,00	0,00	65,00
			Indeks Reformasi Birokrasi	0,00 Poin	0,00	0,00	0,00	70,00	75,00	75,00
1.1.2		Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	52,00 Persen	65,00	70,00	75,00	0,00	0,00	75,00
			Meningkatnya SKPD yang dibina yang menjadi Zona Integritas WBK (Hapus)	0,00 SKPD	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			Tertanganinya Laporan yang bersifat Pungutan Liar (Hapus)	12,00 Laporan	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
			Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	0,00 Persen	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00	85,00
1.1.3		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,00 Persen	85,00	86,00	87,00	0,00	0,00	87,00
			Meningkatnya jumlah SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) yang melaporkan keuangan sesuai peraturan (Hapus)	0,00 Persen	21,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
			Meningkatnya penyelesaian TLHP Eksternal (BPK-RI) (Hapus)	69,45 Persen	75,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
			Meningkatnya penyelesaian TLHP Internal (Inspektorat Kab.Cirebon) (Hapus)	79,46 Persen	82,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,46 Persen	0,00	0,00	0,00	88,00	89,00	89,00

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Agamis, Maju dan Aman			
MISI 1 :	Meningkatkan produktifiktas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Jumlah OPD yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Penguatan tata kelola pemerintah yang baik melalui revitalisasi sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Meningkatkan Integritas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan yang terintegrasi berbasis elektronik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya	Meningkatkan Profesionalitas, Integritas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

URAIAN	Pagu APBD Perubahan	Jml. Belanja	Sisa DPA	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**3.818.116.300**	**3.595.187.540**	**222.928.760**	**94,16**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**2.233.709.900**	**2.178.245.041**	**55.464.859**	**97,52**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	115.040.000	113.390.000	1.650.000	98,57
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.110.000	154.110.000	-	100,00
Reviu Laporan Kinerja	426.049.900	415.649.650	10.400.250	97,56
Reviu Laporan Keuangan	193.750.000	187.470.000	6.280.000	96,76
Pengawasan Desa	551.592.000	542.192.400	9.399.600	98,30
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	793.168.000	765.432.991	27.735.009	96,50
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**1.584.406.400**	**1.416.942.499**	**167.463.901**	**89,43**
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	212.043.200	204.266.999	7.776.201	96,33

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.372.363.200	1.212.675.500	159.687.700	88,36
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**1.289.055.600**	**1.192.893.270**	**96.162.330**	**92,54**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	**571.197.200**	**530.729.770**	**40.467.430**	**92,92**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	258.879.400	249.998.623	8.880.777	96,57
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	312.317.800	280.731.147	31.586.653	89,89
Pendampingan dan Asistensi	**717.858.400**	**662.163.500**	**55.694.900**	**92,24**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	260.774.400	221.698.500	39.075.900	85,02
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16.272.000	5.844.000	10.428.000	35,91
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	440.812.000	434.621.000	6.191.000	98,60
JUMLAH	**5.107.171.900**	**4.788.080.810**	**319.091.090**	**93,75**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Inspektorat Kabupaten Cirebon 2023

Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

URAIAN	Pagu APBD Perubahan	Jml. Belanja	Sisa DPA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**22.974.895.950**	**21.894.062.063**	**1.080.833.887**	**95,30**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.751.400	100.577.157	12.174.243	89,20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.831.400	42.991.157	4.840.243	89,88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.018.000	35.480.000	4.538.000	88,66
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.902.000	22.106.000	2.796.000	88,77
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**17.047.225.000**	**16.337.253.067**	**709.971.933**	**95,84**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.968.731.800	16.266.420.110	702.311.690	95,86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.387.200	32.073.957	5.313.243	85,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.904.000	15.004.000	1.900.000	88,76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.202.000	23.755.000	447.000	98,15
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**12.686.200**	**12.665.200**	**21.000**	**99,83**

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.323.000	5.317.000	6.000	99,89
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.363.200	7.348.200	15.000	99,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**554.254.500**	**508.306.057**	**45.948.443**	**91,71**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.548.800	49.800.000	6.748.800	88,07
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	497.705.700	458.506.057	39.199.643	92,12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.079.883.250**	**1.040.632.946**	**39.250.304**	**96,37**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.831.100	8.792.100	12.039.000	42,21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.440.550	302.292.300	25.148.250	92,32
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.758.000	17.758.000	-	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.618.800	192.028.800	1.590.000	99,18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.974.400	13.968.000	6.400	99,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	45.000.000	-	100,00
Penyediaan Bahan/Material	140.103.800	140.082.686	21.114	99,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	-	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.991.600	248.770.646	220.954	99,91
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	57.165.000	56.940.414	224.586	99,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**306.393.000**	**302.325.000**	**4.068.000**	**98,67**
Pengadaan Mebel	306.393.000	302.325.000	4.068.000	98,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**559.176.000**	**483.392.436**	**75.783.564**	**86,45**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.416.000	42.077.102	1.338.898	96,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.760.000	139.655.334	31.104.666	81,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.000.000	301.660.000	43.340.000	87,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.302.526.600**	**3.108.910.200**	**193.616.400**	**94,14**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.049.000	153.261.600	3.787.400	97,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	422.739.600	396.723.300	26.016.300	93,85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.660.000	56.545.000	115.000	99,80

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.666.078.000	2.502.380.300	163.697.700	93,86
JUMLAH	**22.974.895.950**	**21.894.062.063**	**1.080.833.887**	**95,30**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2023

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Cirebon yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokasi	Poin	Meningkat	70
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon.	Prosen	Meningkat	80
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosen	Meningkat	88

Pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Cirebon melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Reviu Perjanjian Kinerja Terlampir.

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Reviu Inspektur Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokasi	Poin	Meningkat	70
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon.	Prosen	Meningkat	80
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosen	Meningkat	88

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel II. 7 Dukungan Anggaran untuk Mencapai Sasaran Strategis

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	a. Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	Rp22.974.895.950,00
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Laporan Kinerja dan Pelaporan		
	e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp3.818.116.300,00
		Program Kebijakan, Program Perumusan Pendampingan dan Asistensi	Rp1.289.055.600,00
Jumlah Anggaran			Rp. 28.082.067.850

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah SIMWASDA (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) yaitu instrument untuk mengetahui history pengawasan sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) adalah instrument untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan. SISWASKEUDES adalah instrument dalam pengawasan pemanfaatan dana desa.

Gambar II. 1 Sistem Informasi Pengawasan Daerah

Gambar II. 2 Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

Gambar II. 3 Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa

User Authetication SISWASKEUDES 2022

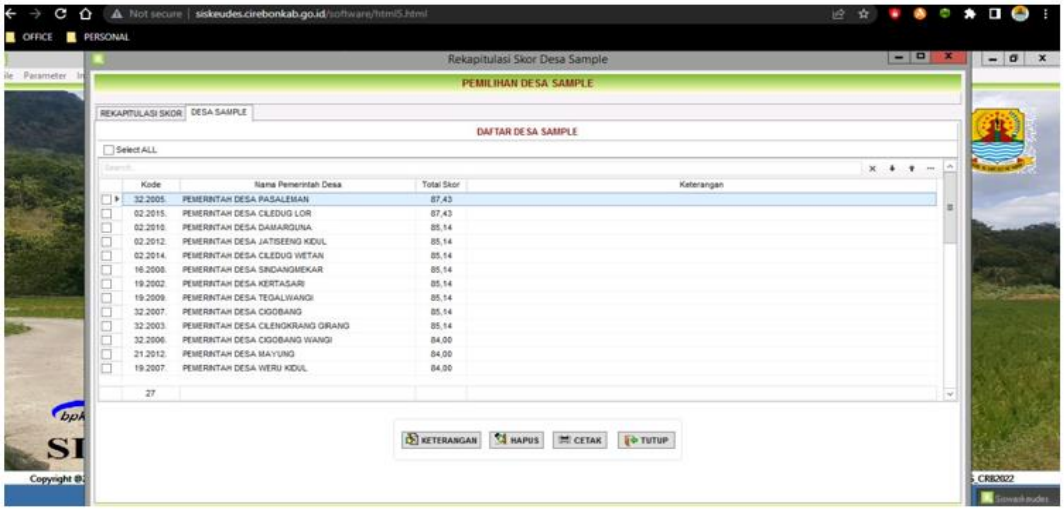

Rekapitulasi Skor Risiko Desa Sample

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Inspektorat Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Kabupaten Cirebon dengan Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indikator: Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Meta Indikator: Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat KABUPATEN CIREBON dan Itjen Kemendagri)	%	75	93,13	88	94,35	107,21	Sangat Baik	90

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis **Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal** didapatkan dari tiga komponen penyusun yaitu hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Kabupaten Cirebon terhadap obyek pemeriksaan di Pemda Kabupaten Cirebon maupun Kabupaten/Kota diwilayah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

3.1.1 Pemeriksaan BPK RI

BPK RI menerbitkan empat laporan hasil pemeriksaan di tahun 2023 yang diterima oleh Pemda Kabupaten Cirebon. Adapun LHP yang terbit yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 10/LHP/XVIII.BDG/05/2023;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tahun Anggaran 2021-Triwulan 3 Tahun 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 12/LHP/XVIII.BDG/01/2024;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor 20/LHP/XVIII.BDG/05/2023
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah (Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 03/LHP/XVIII.BDG/01/2022
5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 Nomor 15/LHP/XVIII.BDG/05/2021.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemda Kabupaten Cirebon telah menindaklanjuti secara keseluruhan. Adapun rincian penyelesaian sebagai mana tabel berikut.

Tabel III. 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Pada Pemda Kabupaten Cirebon

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan(Rp)	Keterangan
LHP Terbit	1		
Temuan	27	7.885.357.476,73	
Rekomendasi	107	6.627.958.040,50	
Tindak Lanjut			
Sesuai	29	1.295.440.119	27,10%
Belum Sesuai	23	2.557.017.360	21,50%
Belum Tindak Lanjut	55	2.755.500.561	51,40%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	0	0	0,0%

Kekurangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana tabel II.3 tersebut telah ditindaklanjuti dalam semester II tahun 2023. Akan tetapi sampai dengan 31 Desember 2023 belum ada risalah semseter II tahun 2023 yang diterbitkan, sehingga masih belum ada data capaian terbaru di 2023.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Auditan/SKPD tidak melakukan penagihan secara maksimal atas TGR yang dibebankan kepada penyedia barang/jasa dalam hal rekomendasi pengembalian ke kas daerah oleh penyedia;
2. SKPD kurang tepat memberikan dokumen tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi sulit ditindaklanjuti disebabkan oleh hal-hal yang bersifat uncontrollable.
4. Pejabat yang bertanggungjawab atas suatu temuan sudah tidak menjabat lagi (mutase/pension).
5. Rekomendasi pengembalian ke kas daerahsulit ditindaklanjuti sebab jumlah pengembalian secara global, tidak terdapat rincian pengembalian per kegiatan.

3.1.2 Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon

Inspektorat Kabupaten Cirebon selaku APIP Internal tahun 2023 telah melaksanaan pemeriksaan reguler operasional, tujuan tertentu dan tematik sebanyak 211 pemeriksaan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon meliputi OPD, UPTD, SD/SMP, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Adapun rincian hasil pemeriksaan operasional reguler dan tindaklanjutnya sebagai berikut :

Tabel III. 4 Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	211		
Temuan	2.554	49.001.548.027,19	
Rekomendasi	2.567	49.001.548.027,19	
Sesuai	1.737	31.979.521.763,68	67,67%
Dalam Proses Tindak Lanjut	5	0,94	0,20%
Belum Tindak Lanjut	825	17.022.026.262,57	32,13%

Sumber: Analis Evaluasi

Hasil perhitungan komposit dari dua sub indikator diatas diperoleh capaian sebagai berikut :

Tabel III. 5 Pengukuran Capaian Sasaran

Sub-Indikator	Persentase Capaian	Rata-Rata Persentase
a) TLHP BPK RI Perhitungan: Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi dikalikan 100%	= (52/107)x100% = 48,6%	58,23 %
b) TLHP inspektorat KABUPATEN CIREBON Perhitungan: Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi dikalikan 100%	= (1742/2567) x 100% = 67,86%	

Kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2024(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	56,18	70	67,83	96,9%	75	
2	Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	92%	80%	89%	111,25%	85%	104,71%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,03%	88%	88%	100%	89%	98,88%

Analisis Ketercapaian Sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut:

a. Indikator sasaran MCP KPK RI dan Indeks kepuasan masyarakat tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 111,25% dan 100%.
b. Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi belum tercapai 67,83 dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 96,9% (belum tercapai);
c. Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 56,18 sehingga ada kenaikan sebesar 11,65 atas capaian tahun 2022 sebesar 10,5%;
d. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a. **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala**
Kegiatan pengawasan internal berkala mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan umum serta, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD/unit kerja yang diperiksa telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

b. **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**
Pendampingan dan asistensi merupakan salah satu sub kegiatan yang ada dalam kegiatan ini. Pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di OPD Pemda Kabupaten Cirebon *auditee* atau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait lainnya sebagai mitra Inspektorat Kabupaten Cirebon. Salah satu upaya adalah dilaksanakannya Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda). Dengan menginformasikan hasil pengawasan serta kebijakan pengawasan kepada OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon, diharapkan agar pihak-pihak terkait menyadari pentingnya fungsi pengawasan guna terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Koordinasi intensif ke OPD baik secara formal maupun non formal melalui penanggungjawab pelaksana tindak lanjut;
b. Koordinasi langsung ke BPK RI secara daring dengan menghadirkan kepala OPD, desk secara langsung dengan kepala perangkat daerah;
c. Pemanfaatan aplikasi simwasda secara optimal dan riil time.
d. Dukungan anggaran yang cukup.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon:

a. Rekomendasi keuangan yang belum terbayarkan oleh pihak ke-3
b. Proses berjenjang di internal BPK RI sehingga dokumen tindak lanjut yang diusulkan **Sesuai** oleh BPK Perwakilan apabila belum sampai dengan tahap validasi BPK Pusat belum terhitung sebagai rekomendasi yang terselesaikan sehingga berpengaruh terhadap persentase penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

GAMBAR 3.1
DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

GAMBAR 3.2
DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

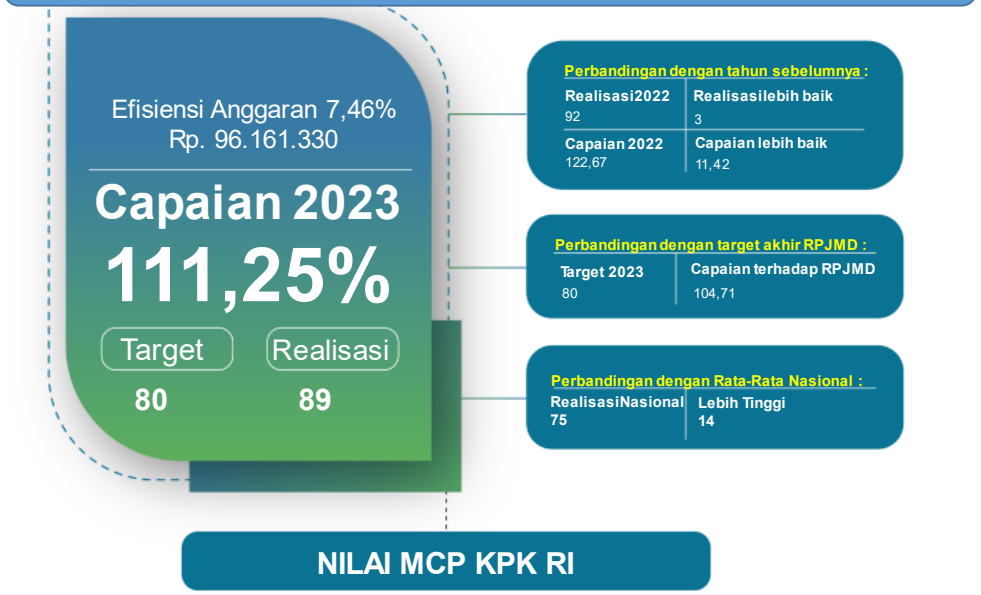

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK membentuk MCP di setiap Pemda dengan menggandeng Inspektorat sebagai koordinator di setiap daerah. Adapun area intervensi dan indikator yang digunakan dalam menilai MCP KPK adalah sebagaimana Tabel III.8.

Tabel III. 7 Area Intervensi, Indikator, Dan Sub Indikator Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Standar Satuan Harga (SSH)	Penetapan SSH
			Implementasi SSH
		Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB dan HSPK
			Kesesuaian SSH & ASB/ HSPK dan Implementasi ASB/ HSPK
		Penganggaran APBD	Penyerahan RAPBD
			Persetujuan DPRD
			Publikasi APBD

		Pengawasan	Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan & Tindak Lanjutnya
			Reviu RKPD & Tindak Lanjutnya
			Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) & Tindak Lanjutnya
2	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen
			Ketersediaan SDM UKPBJ
			Ketersediaan Fungsional PBJ
		Pelaksanaan Tupoksi	Reviu Perencanaan PBJ
			Vendor Management System
			Evaluasi Kegiatan PBJ
			Advokasi PBJ
		Perangkat Pendukung	Kode Etik
			SOP
			TPP Khusus UKPBJ
		Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP
		Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS
			Reviu Kinerja UKPBJ dan Tindak Lanjutnya
3	Perizinan	Regulasi	Perda/ Perkada RTRW/ RDTR
			Perkada Perizinan
			SK Kada Tata Kelola Perizinan
		Infrastruktur	Sistem Perizinan *Online* Daerah
			Lokasi dan Tempat Layanan
			Media Publikasi
		Proses Perizinan	Pendelegasian Kewenangan
			Rekomendasi Teknis
			Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat
		Pengendalian dan Pengawasan	Penanganan Pengaduan
			Reviu Kinerja Perizinan dan Tindak Lanjutnya
4	Pengawasan APIP	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM
			Ketersediaan Anggaran
			Saluran WBS
		Saluran Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
		Probity Audit	Laporan Hasil *Probity Audit*
		Pemeriksaan Khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	% Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
5	Manajemen ASN	Regulasi	Perkada
			SK Kada
		Sistem Informasi	Sistem Informasi Manajemen ASN
		Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN
			Pengendalian Gratifikasi
		Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan
			Tambahan Penghasilan Pegawai
			Promosi, Rotasi, Mutasi
			Manajemen Kinerja
		Pengawasan	Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN
			Evaluasi Benturan Kepentingan
6	Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Potensi Pajak
			Data Tunggakan Pajak
		Inovasi Peningkatan Pajak	Usulan Inovasi

			Laporan Hasil Inovasi Pajak
		Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak
		Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak
7	Manajemen Aset Daerah	Database Aset	Penatausahaan Aset
			Koordinasi dan Rekonsiliasi
		Pengelolaan Aset	Regulasi
			Pengawasan
		Sertifikasi Aset	% Sertifikasi Aset
		Penertiban Aset	Penertiban Aset
8	Tata Kelola Keuangan Desa	Publikasi	Publikasi APBDes
			Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes
		Regulasi	Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Pengawasan	Audit Keuangan Desa

Tahun 2023 Pemda Kabupaten Cirebon dengan pengawalan dari Inspektorat Kabupaten Cirebon telah berhasil mencapai nilai sebesar 89%.

Gambar III. 1 Capaian MCP KPK Pemda Kabupaten Cirebon

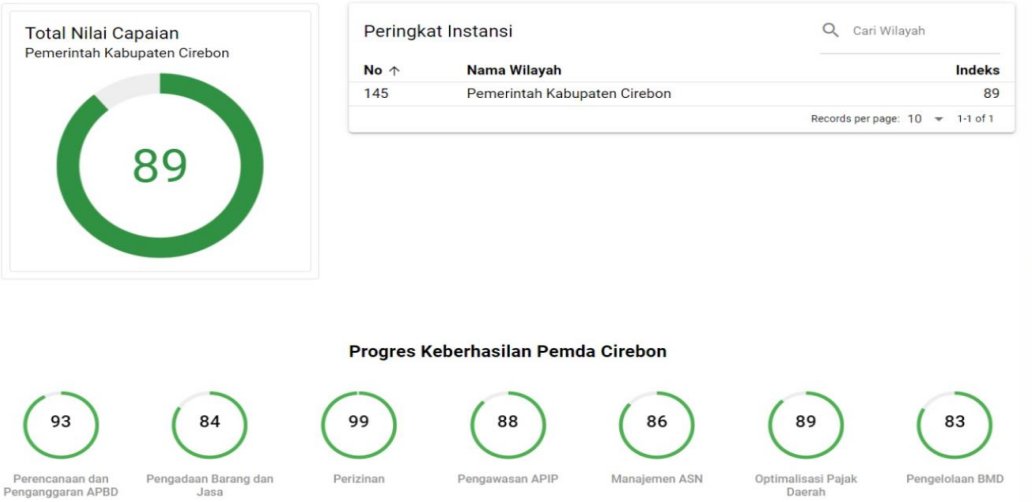

Sumber: jaga.id

3.3 Efisiensi Anggaran

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.717.918.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.410.421.500,00 atau sebesar 94,62%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel III. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	75	56.97	81.39	3.818.116.300	3.595.187.540	94,16	5,37
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan & Penanganan Laporan yang Berindikasi Korupsi	Indikator: Nilai Monitoring MCP KPK RI	80	89	111.25	1.289.055.600	1.192.893.270	92.54	7.46
Jumlah						5.107.171.900	4.788.080.810	93,75	6.25
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	88	100	22.974.895.950	21.894.062.063	95,30	4,70
Total Belanja Langsung						**22.974.895.950**	**21.894.062.063**	**95,30**	**4,70**

Sumber: Laporan Keuangan Inspektorat Th 2021

Sisa anggaran sebesar Rp. 1.399.924.977,00 antara lain bersumber dari:

- Efisiensi belanja lembur pegawai;
- Pada kegiatan bimtek anggaran tidak terserap makasimal karena tidak ada jadwal pembaruan dari BPKP.
- Belanja operasional harian pemeriksaan
- Sisa kontrak pihak ketiga rehabilitasi Gedung kantor
- Penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dikarenakan mobilitas pegawai (pegawai pension dan perpindahan tugas).

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 95,01%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 1.399.924.977,00 atau 4,99%

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Pemanfaatan aplikasi virtual meeting untuk melakukan desk tindak lanjut hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, dan kegiatan yang memerlukan tatap muka dialihkan secara daring;

b. Memanfaatkan sistem online untuk pengisian laporan pekerjaan harian (diary) setiap pegawai di Inspektorat Kabupaten Cirebon; form notulensi; form asistensi; pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Cirebon yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel III. 9 Inventarisasi Lintas Sektor Inspektorat Kabupaten Cirebon

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat	koordinator tindak lanjut	terselelesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Pemda KABUPATEN CIREBON	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi Kelompok Sasaran: 1. Peningkatan sistem pengendalian intern unit kerja 2. Penurunan peluang pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
		OPD/unit kerja di Lingkungan Pemda KABUPATEN CIREBON	obyek pemeriksaan			
		BPK/APIP	Sebagai pemeriksa atas kegiatan pada Pemda KABUPATEN CIREBON			
2.	Pengawasan Umum/ Teknis di Kabupaten/Kota	Inspektorat	Melakukan pengawasan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa program kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi	rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan	OPD Kab/Kota	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran eningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Evaluasi pkegiatan/kebijaka
		OPD Kabupaten/Kota	sebagai obyek pemeriksaan			

		Inspektorat Kabupaten/ Kota	koordinator OPD Kab/Kotayang mengawal, mendampingi pada saat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat KABUPATEN CIREBON serta koordinator tindak lanjut hasil pengawasan			n di kabupaten/kota 2. Peningkatan Kapasitas Tim RB Perangkat Daerah
3.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Inspektorat	Koordinator	tindak lanjut penyelesaian TP/TGR	unit kerja di lingkungan Pemda KABUPATEN CIREBON dan masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi Sasaran: 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
		Majelis TPTGR	pelaksana penyelesaian TPTGR			
		BPK	Pemantau dan evaluator pelaksanaan TPTGR			
		OPD Pemda/ KABUPATEN CIREBON	obyek pemantauan selaku pihak yang memiliki TP/TGR			
		masyarakat	obyek pemantauan selaku pihak yang memiliki TP/TGR			
4.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Koordinator	Rencana Pengawasan tahun selanjutnya	stakeholder terkait	Bagi OPD: 1. Sebagai bahan masukan sehingga dalam perencanaan pegawasan akan didapatkan perencanaan yang bisa mengakomodir kebutuhan- kebutuhan yang tepat, serta tidak tumpang tindih.
		OPD Pemda KABUPATEN CIREBON	pemberi saran dan masukan			
		BPKP/Itjen Kemendagri	sinkronisasi perencanaan pengawasan			
		Inspektorat Kab/Kota	pemberi saran dan masukan serta konsolidasi pengawasan kab/kota			
5.	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat KABUPATEN CIREBON	koordinator dan tim penilai pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil evaluasi LPPD Kab/Kota se KABUPATEN CIREBON	Kab/Kota	Bagi OPD: 1. mendukung capaian sasaran Pemda : Nilai internal integritas organisasi dan Nilai eksternal persepsi korupsi
		Inspektorat Kab/Kota	pendamping terhadapa pelaksanaan EKPPD di kab/kota			
		BPKP Perwakilan KABUPATEN CIREBON	bersama dengan Inspektorat KABUPATEN CIREBON membentuk tim penilai EKPPD kab/kota			
		Biro Tapem Kab/Kota	pelaksana EKPPD kabupaten/kota			

6.	Satuan Tugas Saberpungli	Inspektorat KABUPATEN CIREBON	koordinator dan sekretariat selaku penyedia dukungan dana untuk kegiatan Satgas Saber pungli	Pelayanan publik KABUPATEN CIREBON bebas pungli	unit kerja pemberi layanan publik	mendukung capaian sasaran Pemda : Nilai eksternal persepsi korupsi)
		Kejaksaan TInggi KABUPATEN CIREBON	ketua 2 UPP Satgas Saberpungli KABUPATEN CIREBON (Aswas Kejati) sekaligus anggota tim satgas			
		Kepolisian Daerah KABUPATEN CIREBON	Ketua pelaksana UPP Satgas Saberpungli KABUPATEN CIREBON (Irwasda) sekaligus anggota tim satgas			
		BINDA KABUPATEN CIREBON	kelompok ahli Satgas Saberpungli			
7.	Unit Pengendali Gratifikasi	Inspektorat	memfasilitasi pelaporan gratifikasi dari ASN/ penyelenggara negara yang berada di lingkup Pemda KABUPATEN CIREBON, mulai dari laporan, verifikasi awal, sebelum disampaikan kepada KPK untuk mendapatkan ststus penetapan status terkait obyek gratifikasi yang dilaporkan	pelaporan gratifikasi ke KPK	ASN/ penyelenggaran negara	mendukung capaian sasaran Pemda : Nilai internal integritas organisasi, Nilai Eksternal Pelayanan Publik dan Nilai eksternal persepsi korupsi
		ASN Pemda KABUPATEN CIREBON/ penyelenggara negara	obyek pelaksana kepatuhan atas gratifikasi			
		KPK	verifikator laporan gratidikasi			

BAB 4
Penutup

Bab 4 Berisi :
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja antara lain:
   a. Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Cirebon mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
   b. Pengawasan oleh Kementerian Teknis pada Pemda Kabupaten Cirebon belum terkoordinasi secara baik, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kementerian Teknis tidak terpantau oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon;
   c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;
2. Faktor pendukung ketercapaian kinerja antara lain:
   a. berjalannya fungsi konsultatif dan peran Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi, *sharing* dengan semangat mengawal tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;
   b. komitmen dan integritas setiap unsur di Inspektorat Kabupaten Cirebon dimana setiap unsur dituntut untuk mau dan mampu meningkatkan kinerja dan kemampuannya;
   c. koordinasi intensif dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemda Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemda Kabupaten Cirebon.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan sebagai berikut:

1. komunikasi lebih intensif terhadap *stakeholder* terkait (Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota) dalam rangka konsolidasi dan penyusunan perencanaan pengawasan kedepannya;
2. mengikutsertakan unsur dalam pendidikan, pelatihan, atau srertifikasi keahlian yang terakreditasi oleh badan akreditasi terkait dalam rangka

peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Kabupaten Cirebon;

3. pembinaan dan pengawalan pada OPD untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada setiap masing-masing manajemen OPD sehingga diharapkan OPD mampu melakukan *self diagnostic assestment* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin datang dalam pelaksanaan program kegiatan.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	**Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih**		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2,75 Poin	3,00	3,10	0,00	0,00
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	0,00 Persen	0,00	0,00	79,33	83,00
1.1.1.		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00 Poin	60,00	65,00	0,00	0,00
			Indeks Reformasi Birokasi.	0,00 Poin	0,00	0,00	70,00	75,00
1.1.2.		Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	65,00 Prosen	70,00	75,00	0,00	0,00
			Meningkatnya SKPD yang dibina yang menjadi Zona Integritas WBK (Hapus)	6,00 SKPD	10,00	0,00	0,00	0,00
			Tertanganinya Laporan yang bersifat Pungutan Liar (Hapus)	12,00 Laporan	12,00	0,00	0,00	0,00
			Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon.	0,00 Prosen	0,00	0,00	80,00	85,00
1.1.3.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00 Prosen	86,00	87,00	0,00	0,00
			Meningkatnya jumlah SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) yang melaporkan keuangan sesuai peraturan (Hapus)	21,00 Prosen	24,00	0,00	0,00	0,00
			Meningkatnya penyelesaian TLHP Eksternal (BPK-RI) (Hapus)	75,00 Prosen	78,00	0,00	0,00	0,00
			Meningkatnya penyelesaian TLHP Internal (Inspektorat Kab. Cirebon) (Hapus)	82,00 Prosen	84,00	0,00	0,00	0,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	0,00 Prosen	0,00	0,00	88,00	89,00

Sumber : Renstra Inspektorat 2019-2024

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON., M.Ag
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON., M.Ag

Pihak Kesatu,

Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel		Non Kumulatif	Meningkat		79.33 Persen	79.33 Persen
1.1.01.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokasi.		Non Kumulatif	Meningkat		70 Poin	70 Poin
1.1.02.	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon.		Non Kumulatif	Meningkat		80 Prosen	80 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		Non Kumulatif	Meningkat		88 Prosen	88 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.103.115.000,00	1.289.055.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.531.279.400,00	3.818.116.300,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.860.232.250,00	22.974.895.950,00	Sumber Dana: DTU-DAU
	J U M L A H	**26.494.626.650,00**	**28.082.067.850,00**	

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON., M.Ag

Sumber, Oktober 2023
Pihak Kesatu
Inspektur,

Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

Lampiran 3. Evaluasi Maturitas SPIP 2023

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur,13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 — 28 Desember 2023
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP
di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,
Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
133	PW08	8	Kabupaten Lampung Timur	3.004	3	2.810	2	2.252	2	3.000	3
134	PW08	9	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.049	3	2.656	2	2.580	2	3.000	3
135	PW08	10	Kabupaten Pringsewu	3.152	3	3.045	3	2.800	2	3.000	3
136	PW08	11	Kabupaten Lampung Tengah	3.158	3	3.070	3	2.720	2	3.000	3
137	PW08	13	Kabupaten Lampung Utara	2.418	2	2.345	2	1.520	1	2.900	2
138	PW08	14	Kabupaten Mesuji	2.885	2	2.494	2	2.340	2	3.000	3
139	PW08	12	Kabupaten Lampung Barat	3.198	3	3.130	3	2.660	2	3.000	3
140	PW08	15	Kabupaten Pesisir Barat	2.400	2	2.050	2	2.166	2	2.740	2
9			DKI Jakarta								
10			Jawa Barat								
141	PW10	1	Kota Bekasi	2.690	2	2.807	2	2.970	2	3.000	3
142	PW10	2	Kota Banjar	3.021	3	2.576	2	2.920	2	3.000	3
143	PW10	3	Kabupaten Kuningan	3.047	3	2.857	2	2.630	2	3.000	3
144	PW10	4	Kabupaten Indramayu	2.795	2	2.388	2	2.780	2	2.290	2
145	PW10	5	Kota Depok	3.154	3	2.995	2	2.970	2	3.000	3
146	PW10	6	Kabupaten Sumedang	3.200	3	3.257	3	3.000	3	3.000	3
147	PW10	7	Kabupaten Bandung	3.145	3	2.913	2	2.750	2	3.000	3
148	PW10	8	Kabupaten Garut	3.173	3	3.097	3	2.770	2	3.000	3
149	PW10	9	Kabupaten Sukabumi	3.196	3	3.144	3	2.930	2	3.000	3
150	PW10	10	Kabupaten Bogor	2.610	2	2.539	2	2.070	2	3.210	3
151	PW10	11	Kabupaten Pangandaran	3.039	3	3.352	3	2.430	2	3.000	3
152	PW10	12	Kabupaten Ciamis	3.431	3	3.457	3	2.920	2	3.000	3
153	PW10	13	Kota Bogor	3.296	3	3.045	3	3.000	3	3.520	3
154	PW10	14	Kota Bandung	2.461	2	2.354	2	1.722	1	3.000	3
155	PW10	15	Kabupaten Subang	2.598	2	2.338	2	2.080	2	2.000	2
156	PW10	16	Kota Cirebon	3.056	3	3.001	3	2.930	2	3.000	3
157	PW10	17	Kota Sukabumi	3.346	3	2.913	2	2.670	2	3.000	3
158	PW10	18	Kabupaten Purwakarta	3.320	3	3.083	3	2.960	2	3.000	3
159	PW10	19	Kabupaten Tasikmalaya	3.029	3	3.057	3	2.940	2	3.000	3
160	PW10	20	Kabupaten Cirebon	3.023	3	2.990	2	2.930	2	3.000	3
161	PW10	21	Kota Tasikmalaya	3.072	3	2.776	2	2.110	2	3.000	3
162	PW10	22	Kabupaten Bekasi	2.729	2	2.730	2	2.150	2	2.820	2
163	PW10	23	Kabupaten Cianjur	3.018	3	2.932	2	2.930	2	3.000	3
164	PW10	24	Kabupaten Karawang	3.031	3	2.925	2	2.800	2	2.620	2
165	PW10	25	Kabupaten Bandung Barat	2.826	2	2.625	2	2.580	2	2.620	2
166	PW10	26	Kabupaten Majalengka	3.061	3	3.063	3	3.000	3	3.000	3
167	PW10	27	Kota Cimahi	3.020	3	2.963	2	2.930	2	3.000	3
11			Jawa Tengah								
168	PW11	1	Kabupaten Boyolali	3.038	3	2.840	2	2.910	2	3.020	3
169	PW11	2	Kabupaten Karanganyar	3.168	3	2.980	2	2.780	2	3.000	3
170	PW11	3	Kabupaten Kudus	3.001	3	2.890	2	2.870	2	3.020	3
171	PW11	4	Kota Surakarta	3.267	3	3.106	3	2.874	2	3.030	3
172	PW11	5	Kabupaten Pekalongan	3.006	3	2.781	2	2.874	2	3.090	3
173	PW11	6	Kota Semarang	3.086	3	2.860	2	2.910	2	3.040	3
174	PW11	7	Kabupaten Banyumas	3.250	3	3.081	3	3.000	3	3.000	3
175	PW11	8	Kabupaten Blora	3.033	3	2.860	2	2.720	2	3.000	3
176	PW11	9	Kabupaten Pati	3.091	3	2.631	2	2.264	2	3.060	3
177	PW11	10	Kabupaten Sragen	3.067	3	2.906	2	2.874	2	3.000	3
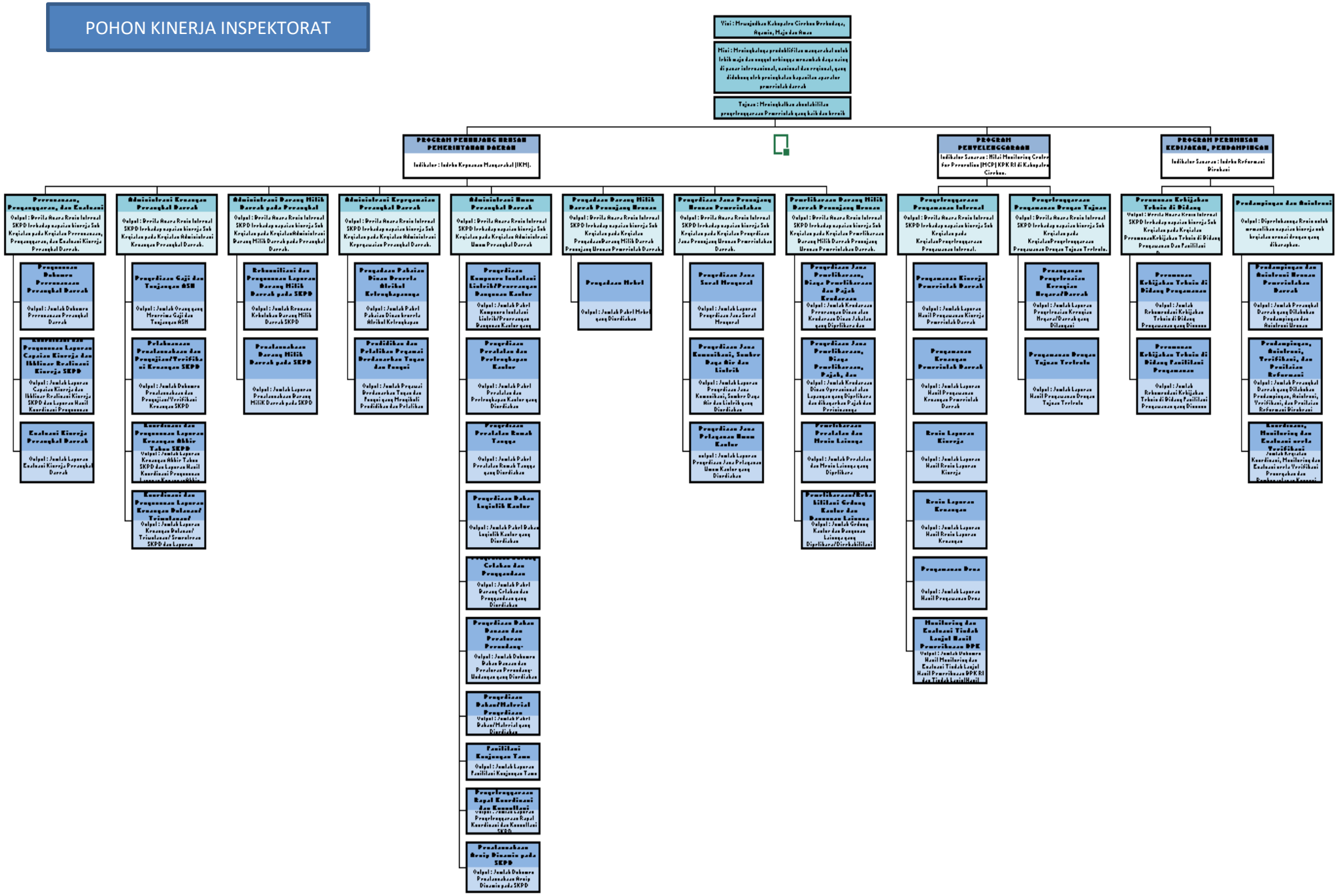
POHON KINERJA INSPEKTORAT